

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen merupakan suatu proses informasi yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan, mengawasi, dan mengambil keputusan strategis bagi perusahaan. Informasi yang disajikan tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup data non-keuangan seperti kinerja operasional, sumber daya manusia, produksi, hingga pemasaran. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan, akuntansi manajemen berperan sebagai alat strategis yang membantu manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efektif, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi (Savitri & Andreas, 2023).

Secara historis, akuntansi manajemen muncul dari kebutuhan akan informasi akuntansi yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam menghadapi kompleksitas dan skala bisnis yang semakin besar. Fungsi utama dari akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi bagi pihak internal perusahaan, khususnya manajemen, dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja (Irnawati *et al.*, 2020).

Menurut Hansen & Mowen (2009), akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi untuk pihak internal seperti manajer, eksekutif, dan pekerja. Proses ini mencakup kegiatan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang relevan guna membantu proses perencanaan, pengendalian operasional, dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Dengan demikian, akuntansi manajemen tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sistem pendukung keputusan yang penting dalam menjalankan strategi organisasi secara keseluruhan.

2.1.2. Akuntansi Keberlanjutan

Akuntansi keberlanjutan menurut Zyznarska-Dworczak (2020) merupakan suatu sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan aspek keuangan, sosial, dan lingkungan dari aktivitas bisnis. Sistem ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan terkait peran serta tanggung jawab perusahaan dalam

mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Awanda & Bayangkara, 2025). Akuntansi keberlanjutan melibatkan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan pelaporan informasi yang berkaitan dengan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan.

Melalui pendekatan ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan dampak operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Akuntansi keberlanjutan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis, sekaligus sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Dalam konteks pengungkapan SDGs, akuntansi keberlanjutan menyediakan kerangka yang memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan komitmen mereka terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.3. Teori Legitimasi

Teori legitimasi pada dasarnya diasumsikan bahwa untuk mencapai keberhasilan operasional organisasi, manajer harus memastikan bahwa organisasi mereka tampak beroperasi sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga dianggap "sah". Sebuah organisasi dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat jika dianggap tidak sah dan tidak memenuhi harapan masyarakat. Sanksi ini dapat mencakup pembatasan operasional, kesulitan dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan, seperti tenaga kerja, atau penurunan permintaan untuk barang dan jasa, serta hal-hal lainnya (Deegan, 2019).

Ulfa *et al.* (2025) menjelaskan bahwa teori legitimasi menjadi relevan, dimana perusahaan berusaha mendapatkan dukungan dan penerimaan masyarakat dengan mengungkapkan aktivitas sosial dan lingkungan. Bahkan perusahaan yang mengalami kerugian dapat mempertahankan legitimasi publik dengan melaporkan keberlanjutan secara menyeluruh. Oleh karena itu, legitimasi masyarakat terhadap perusahaan merupakan faktor strategis untuk kemajuan masa depan perusahaan sehingga legitimasi dianggap penting bagi perusahaan (Abdullah, 2020). Berdasarkan konteks penelitian ini, teori legitimasi menjadi landasan teoritis untuk menjelaskan mengapa perusahaan merasa perlu mengungkapkan informasi terkait SDGs dan kinerja lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya menjaga kepercayaan publik.

2.1.4. Sustainable Development Goals (SDGs)

2.1.4.1. Pengertian SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesepakatan ini merupakan dorongan perubahan yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan, terkait sosial, ekonomi dan lingkungan. Rancangan SDGs ini diharapkan menjadi pedoman dalam mencapai keberlanjutan nasional dan secara global. SDGs kemudian diadopsi dengan tujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat mengenai capaian keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan (Rahmatika *et al.*, 2025).

Di Indonesia, SDGs diimplementasikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan diperkuat dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2022, yang mengintegrasikan tujuan ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2021). Untuk meningkatkan kesejahteraan nasional, SDGs menekankan pendekatan menyeluruh yang melibatkan sektor swasta, termasuk pertambangan (Tobing *et al.*, 2019).

Dalam pengungkapan mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs), ada 17 tujuan utama yang difokuskan pada berbagai aspek penting dari pembangunan dunia. Di dalamnya, berbagai isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan global, diantaranya:

Tabel 2. 1 Tujuan SDGs

Tujuan	Deskripsi Tujuan
Tujuan ke-1 Tanpa Kemiskinan	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
Tujuan ke-2 Tanpa Kelaparan	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
Tujuan ke-3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
Tujuan ke-4 Pendidikan Berkualitas	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
Tujuan ke-5 Kesetaraan Gender	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
Tujuan ke-6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Tujuan ke-7 Energi Bersih dan Terjangkau	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
Tujuan ke-8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
Tujuan ke-9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
Tujuan ke-10 Berkurangnya kesenjangan	Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara.
Tujuan ke-11 Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Tujuan ke-12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
Tujuan ke-13 Penanganan perubahan iklim	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
Tujuan ke-14 Ekosistem kelautan	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan.
Tujuan ke-15 Ekosistem daratan	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
Tujuan ke-16 Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang Tangguh	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
Tujuan ke-17 Kemitraan untuk mencapai tujuan	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sumber: BAPENAS, 2017

2.1.4.2. Pengukuran SDGs

Pengungkapan SDGs ditentukan dengan melihat apakah laporan tahunan mengungkapkan 17 tujuan SDGs. Berikut perhitungannya:

$$17 \text{ Tujuan SDGs} = \frac{\Sigma \text{ total item SDGs yang diungkapkan}}{\Sigma \text{ total item SDGs (17)}} \dots(1)$$

Jika dalam laporan keberlanjutan, Perusahaan mengungkapkan satu tujuan maka akan diberi skor 1 jika tidak maka akan diberi skor 0. Kemudian jumlahkan keseluruhan skor dan dibagi dengan jumlah tujuan yang diharapkan (Pratama *et al.*, 2024).

2.1.5. Good Corporate Governance (GCG)

2.1.5.1. Pengertian GCG

Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya adalah suatu sistem dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengawasi operasional usahanya secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Titisari (2021) mengatakan bahwa *corporate governance* adalah mekanisme pengelolaan bisnis yang dirancang untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menjamin kelangsungan usaha. Sementara itu, Rusdiyanto *et al.* (2019) mengatakan bahwa GCG mencakup aturan dan prosedur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan bisnis dan akuntabilitas jangka panjang dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. Noviana & Akbar (2025) menambahkan bahwa GCG bertujuan menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang mengatur hubungan antar organ perusahaan dan *stakeholders*, dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. GCG tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol internal, tetapi juga sebagai pedoman etis yang mendorong perusahaan untuk menjalankan operasional usahanya secara adil, efektif, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks keberlanjutan, GCG sangat penting dalam mendorong keterbukaan informasi perusahaan, termasuk dalam hal pengungkapan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu,

GCG menjadi instrumen penting untuk mendukung pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.1.5.2. Tujuan dan Manfaat GCG

Good Corporate Governance (GCG) akan meningkatkan kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, menerapkan sistem GCG akan memberikan manfaat untuk membantu mengarahkan dan mengawasi jalannya usaha secara ideal menuju keberhasilan dan akuntabilitas perusahaan (Toha, 2007). Menurut Hery (2010), terdapat lima manfaat bagi perusahaan yang menerapkan GCG, yaitu:

1. *Good Corporate Governance* (GCG) dapat membantu pemanfaatan sumber daya perusahaan menjadi lebih efisien, yang pada gilirannya akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional.
2. *Good Corporate Governance* (GCG) dapat membantu bisnis dan perekonomian nasional, dalam konteks ini menarik modal investor melalui biaya yang lebih rendah, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu manajemen perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah taat pada peraturan, peraturan, dan ketentuan.
4. Membangun manajemen dan Dewan Perusahaan untuk memantau penggunaan aset perusahaan.
5. Meminimalisir tingkat korupsi

Menurut Sudarmanto *et al.* (2021), tujuan dari *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
2. Memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan telah dicapai.
3. Memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik.
4. Memastikan praktik bisnis yang sehat.
5. Memastikan operasi perusahaan transparan.

2.1.5.3. Prinsip-prinsip GCG

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan bahwa lima prinsip yang dianggap baik untuk manajemen perusahaan (GCG) adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Berikut adalah prinsi-prinsip GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.5.4. Pengukuran GCG

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur dari *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu:

1. Dewan Komisaris

Sebagai organ organisasi, Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada Direksi, dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun, mereka tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan operasional (Sudarmanto *et al.*, 2021). Berikut rumus untuk menghitung ukuran dewan komisaris menurut Lestarianti & Sandari (2023) yaitu:

$$\text{Dewan Komisaris} = \sum \text{Anggota Dewan Komisaris} \quad \text{.....(2)}$$

2. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi atau memiliki hubungan bisnis atau kekeluargaan dengan pengendali, dewan komisaris, atau anggota direksi lainnya, serta dengan perusahaan. Jumlah Komisaris Independen yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem pengawasan berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang. Selain itu, salah satu komisaris independen harus memiliki pengalaman dalam akuntansi atau keuangan (Sudarmanto *et al.*, 2021). Berikut rumus untuk menghitung dewan komisaris independen menurut Lestarianti & Sandari (2023) yaitu:

$$\text{DKI} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\% \quad \text{.....(3)}$$

3. Dewan Direksi

Sebagai bagian dari organisasi perusahaan, direksi bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan. Semua anggota direksi memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan mengambil keputusan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, tetapi pelaksanaan tanggung jawab bersama tetap menjadi tanggung jawab bersama (Sudarmanto *et al.*, 2021). Berikut rumus untuk menghitung ukuran dewan direksi menurut Lestarianti & Sandari (2023) yaitu:

$$\text{Dewan Direksi} = \sum \text{Anggota Dewan Direksi} \quad \text{.....(4)}$$

4. Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, bahwa sistem pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan benar, bahwa audit internal dan eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan bahwa manajemen melakukan tindakan lanjut atas temuan audit (Sudarmanto *et al.*, 2021). Berikut rumus untuk menghitung komite audit menurut Leonardo & Mayangsari (2024) yaitu:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit} \quad \text{.....(5)}$$

5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan situasi di mana manajer memiliki sebagian kepemilikan dalam struktur modal perusahaan, sehingga manajer tersebut menjalankan peran ganda sebagai pengelola perusahaan sekaligus sebagai pemegang saham (Darmayanti *et al.*, 2018). Berikut rumus untuk menghitung kepemilikan manajerial menurut Leonardo & Mayangsari (2024) yaitu:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham Manajerial}}{\text{Total Saham}} \dots(6)$$

6. Prinsip GCG

Pengukuran GCG menggunakan prinsip-prinsip GCG berdasarkan pada Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) yaitu sebagai berikut:

$$\text{GCG} = \frac{\Sigma \text{Prinsip yang diterapkan}}{\Sigma \text{Prinsip yang diharapkan}} \dots(7)$$

Perhitungan GCG dengan memberikan skor satu jika satu prinsip diterapkan dan skor 0 jika tidak. Setelah skor diberikan, skor dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah prinsip yang diharapkan untuk memperoleh skor tahunan untuk setiap perusahaan.

2.1.6. Ukuran Perusahaan

2.1.6.1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan dan umumnya diukur berdasarkan total aset, total pendapatan, jumlah karyawan, atau kapitalisasi pasar. Menurut Yusmaniarti *et al.* (2023), perusahaan dengan aset yang besar memiliki keleluasaan lebih bagi manajemen dalam mengelola sumber daya untuk mendukung operasional perusahaan. Selain itu, perusahaan besar lebih mudah memperoleh pendanaan baik dari sumber internal maupun eksternal, sehingga cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi (Kammagi & Veny, 2023).

Ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap tingkat pelaporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perusahaan berskala besar memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mengimplementasikan strategi keberlanjutan dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Oleh

karena itu, organisasi yang lebih besar cenderung lebih aktif dalam pelaporan SDGs.

2.1.6.2. Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (2008), ukuran perusahaan berdasarkan aset bersih dan penjualannya dibagi menjadi empat, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan/aset bersih maksimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), aset bersih tersebut tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan selama satu tahun maksimal Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut
 - 1) Memiliki kekayaan/aset bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), aset bersih tersebut tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan selama satu tahun lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan/aset bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), aset bersih tersebut tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan selama satu tahun lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria Usaha Besar adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan/aset bersih lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), aset bersih tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

2.1.6.3. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur dari ukuran perusahaan, yaitu:

1. (Ln) Total Aset

Ukuran perusahaan dihitung dengan penilaian Logaritma Natural atas Total Aset yang dimiliki oleh perusahaan karena nilai total aset sangat besar jika dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya (Perdana & Adityaputra, 2024). Rumus ukuran perusahaan menggunakan (Ln) total aset adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset} \quad \text{.....(8)}$$

2. (Ln) Total Penjualan

Dalam konteks pengukuran ukuran perusahaan, (Ln) total penjualan digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan skala operasi dan kapasitas ekonomi perusahaan (Alarussi & Alhaderi, 2018). Rumus ukuran perusahaan menggunakan (Ln) total penjualan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = (\text{Ln}) \text{ Total Penjualan} \quad \text{.....(9)}$$

3. Kapitalisasi Pasar

Kapitalisasi pasar adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui ukuran suatu perusahaan, dengan cara mengalikan jumlah saham yang beredar dengan harga satu lembar saham di pasar. Nilai ini menunjukkan seberapa besar kekayaan perusahaan di pasar. Selain itu, kapitalisasi pasar juga menunjukkan berapa banyak dana yang bisa digunakan perusahaan untuk menjalankan usahanya (Farooq *et al.*, 2022). Rumus ukuran perusahaan menggunakan kapitalisasi pasar adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ukuran Perusahaan} \\ = \text{Harga Saham di Pasar} \times \text{Jumlah Saham Beredar} \end{aligned} \quad \text{.....(10)}$$

2.1.7. Kinerja Lingkungan

2.1.7.1. Pengertian Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan adalah proses evaluasi terhadap sejauh mana perusahaan mampu mengendalikan dampak negatif dari aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan (Rahmatika *et al.*, 2025). Kinerja

lingkungan merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik. Jika perusahaan mampu menerapkannya secara optimal, maka masyarakat dan lingkungan sekitar akan memperoleh manfaat yang sepadan. Penerapan kinerja lingkungan yang baik juga mencerminkan bentuk tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap kelestarian bumi (Jubilate & Maulana, 2024). Tujuan utama dari kinerja lingkungan adalah untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan, meminimalkan dampak terhadap ekosistem, serta mendukung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan c

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mengelola dampak negatif dari aktivitas operasional terhadap lingkungan secara menyeluruh. Penerapan kinerja lingkungan yang optimal tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem, tetapi juga berperan dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, kinerja lingkungan juga menunjukkan komitmen sukarela perusahaan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam praktik bisnis secara berkelanjutan.

2.1.7.2. Pengukuran Kinerja Lingkungan

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur dari kinerja lingkungan, yaitu:

1. PROPER

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (1997), PROPER berfungsi sebagai pengawasan pemerintah terhadap Perusahaan; “Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup”. Menurut Cahyani & Puspitasari (2023), ada 5 warna pengelompokkan peringkat pada PROPER dan setiap warna memiliki skor yaitu:

Tabel 2. 2 Kriteria Kinerja Lingkungan

Warna	Keterangan	Nilai
Emas	Sangat-sangat baik	5
Hijau	Sangat baik	4
Biru	Baik	3
Merah	Buruk	2
Hitam	Sangat Buruk	1

Sumber: Cahyani & Puspitasari (2023)

2. Sertifikasi ISO 14001

ISO 14001 adalah standar internasional untuk manajemen sistem lingkungan yang memungkinkan organisasi membuat dan menerapkan kebijakan dan tujuan terkait sistem manajemen lingkungan. Perusahaan yang menerima sertifikat ISO 14001 akan mendapat nilai 1 (satu) dan perusahaan yang tidak menerima akan mendapat nilai 0 (nol) (Oktariyani & Rachmawati, 2021).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari atau diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu terkait pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Partisipasi Pengungkapan SDGs. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini:

1. Penelitian oleh Buniamin Sharifah, Jaffar Romlah, Ahmad Norkhazimah dan Johari Nor Hasimah, (2022) yang berjudul *The Role of Corporate Governance in Achieving SDGs Among Malaysian Companies*, bertujuan untuk menganalisis peran yang dimainkan oleh perusahaan dalam memfasilitasi pencapaian SDGs. Analisis spesifik dilakukan untuk menentukan apakah partisipasi perusahaan dalam SDGs dapat dipengaruhi oleh tata kelola korporasi yang baik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat keterlibatan perusahaan dalam SDGs, ukuran dewan direksi dan jumlah rapat berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat keterlibatan perusahaan dalam SDGs, namun independensi dewan direksi dan keberadaan perempuan dalam dewan direksi tidak berpengaruh dengan keterlibatan perusahaan dalam SDGs.
2. Penelitian oleh Pradnyani Ida Ayu Gede Danika Esa, Tama Gede Mandirta, dan Herawati Happy (2024) yang berjudul Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap *Sustainable Development Goals*, bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good*

- Corporate Governance* yang terdiri dari kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, responsivitas dan profesionalisme terhadap *Sustainable Development Goals*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* yang terdiri dari kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, responsivitas dan profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* Desa.
3. Penelitian oleh Chien Fengsheng (2023) dengan judul *The role of corporate governance and environmental and social responsibilities on the achievement of Sustainable Development Goals in Malaysian logistic companies* bertujuan untuk meneliti dampak tanggung jawab lingkungan dan sosial serta tata kelola perusahaan terhadap pencapaian SDGs perusahaan logistik di Malaysia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab sosial memiliki hubungan positif dengan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan, tata kelola perusahaan memiliki hubungan positif namun tidak signifikan dengan pencapaian SDGs, budaya inovatif merupakan mediator antara tanggung jawab lingkungan bagian dari ESG dan pencapaian SDGs, budaya inovatif merupakan mediator antara tanggung jawab sosial bagian dari pencapaian ESG dan SDGs dan budaya inovatif tidak menjadi mediator antara tata Kelola perusahaan dari sisi ESG dan pencapaian SDGs.
 4. Penelitian oleh Novandito Lucky dan Trisnawati Rina (2024) dengan judul *Pengaruh Csr, Gcg, Pengungkapan Laporan Berkelanjutan, Risiko Perusahaan, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Sdgs* bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR, GCG, Pengungkapan Laporan Berkelanjutan, Risiko Perusahaan, dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan SDGs. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Realisasi dana CSR tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs, *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs, Pengungkapan Laporan Berkelanjutan berpengaruh terhadap pengungkapan SDG, Risiko perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs dan Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs.
 5. Penelitian oleh Surifah dan Krismiaji (2025) dengan judul *The Role of Corporate Governance, Type of Ownership, And Capital Structure, In the Achievement of Sustainable Development Goals* bertujuan untuk memberikan sumbangan teoritis terhadap literatur tentang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan memberikan bukti

empiris tentang peran tata kelola perusahaan (CG), jenis kepemilikan, dan struktur modal perusahaan di Indonesia dalam mencapai SDGs. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi direktur utama tidak mempengaruhi pengungkapan SDGs, kompetensi komisaris utama berpengaruh positif signifikan terhadap SDGs, Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan implementasi SDGs, Koefisien pemegang saham oleh Lembaga swasta domestik dan asing menunjukkan arah negatif terhadap pengungkapan SDG, pemegang saham individu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap SDGs, Struktur modal berdampak negatif terhadap SDGs dan Ukuran perusahaan berdampak negatif terhadap SDGs.

6. Penelitian oleh Pratama Arie, Yadiati Winwin, dan Jaenudin Edi (2024) dengan judul *Ownership structures, company size and age, and Sustainable Development Goals are disclosed in the annual report: Is it acceptable to investors? (Survey among publicly listed companies in Indonesia)* bertujuan untuk melihat seberapa banyak informasi tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menunjukkan bagaimana perusahaan mendukung tujuan global yang disertakan dalam laporan tahunan mereka dan melihat apakah jenis perusahaan dan struktur kepemilikannya mempengaruhi seberapa banyak informasi tentang SDGs yang disertakan dalam laporan keuangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengungkapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) oleh perusahaan masih belum optimal, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan SDG dalam laporan tahunan, usia perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan SDG dalam laporan tahunan, Dispersi kepemilikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan SDG dalam laporan tahunan, dan luasnya pengungkapan SDG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
7. Penelitian oleh Rosati Francesco dan Faria Lourenço Galvão Diniz (2019) dengan judul *Business contribution to the Sustainable Development Agenda: Organizational factors related to early adoption of SDG reporting* bertujuan untuk mengkaji hubungan antara adopsi awal pelaporan SDG dan serangkaian faktor organisasi dengan menggabungkan data dari dua basis data yang disediakan oleh *Global Reporting Initiative* dan *Orbis* untuk mengidentifikasi organisasi yang memasukkan SDGs dalam laporan keberlanjutan mereka dan karakteristik struktural masing-masing. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang

- lebih besar berpengaruh positif dan signifikan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dibahas dalam laporan keberlanjutan mereka, organisasi dengan tingkat kinerja ekonomi yang lebih tinggi cenderung membahas SDGs dalam laporan keberlanjutan mereka, Organisasi dengan tingkat intangibilitas yang lebih tinggi cenderung lebih sering membahas SDGs dalam laporan keberlanjutan, kerangka kerja keberlanjutan terkait secara signifikan dengan adopsi awal pelaporan SDG, Kehadiran jaminan eksternal hanya sedikit signifikan tetapi dengan koefisien positif terhadap kecenderungan memasukkan SDGs dalam laporan keberlanjutan, persentase perempuan yang lebih tinggi di jajaran direksi berpengaruh positif terhadap kecenderungan mengungkapkan SDGs dalam keberlanjutan, dan usia dewan direksi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan membahas SDGs dalam laporan keberlanjutan.
8. Penelitian oleh Wahyuningrum Indah Fajarini Sri, Oktavia Shanty dan Utami Sri (2022) dengan judul *The Effect of Company Characteristics and Gender Diversity on Disclosures Related to Sustainable Development Goals* bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, jenis industri, dan keragaman gender terhadap laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan, leverage berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan, jenis industri berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan, dan keberagaman gender berpengaruh negatif terhadap pengungkapan SDGs.
 9. Penelitian oleh Deomega Fransisca Regina dan Sari Bida (2025) dengan judul *Pengaruh Green Accounting, CSR dan Kinerja Lingkungan Terhadap SDGs 2030 pada Perusahaan Pertambangan Tahun 2019-2023* bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *green accounting*, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kinerja lingkungan terhadap Upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *green accounting* tidak signifikan berpengaruh positif terhadap upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) signifikan berpengaruh positif terhadap upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs),

kinerja lingkungan signifikan berpengaruh positif terhadap upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan penerapan *green accounting*, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan kinerja lingkungan secara bersama-sama signifikan berpengaruh positif terhadap upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

10. Penelitian oleh Rahmatika, Nadia Putri, dan Yupita Lasmi (2025) dengan judul *Pengaruh Green Accounting dan Kinerja Lingkungan terhadap Sustainable Development Goals pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Tahun 2021-2023* bertujuan untuk mengetahui dampak pelaksanaan *green accounting* dan kinerja lingkungan terhadap *Sustainable Development Goals*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *green accounting* tidak mampu mempengaruhi *Sustainable Development Goals* dan kinerja lingkungan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Sustainable Development Goals*.
11. Penelitian oleh Amalikhah Novita Ayu dan Haryono Slamet (2024) Amalikhah, tahun 2024, dengan judul *The Effect of Financial Performance, Environmental Performance, Tax Avoidance, and Gender Diversity on Sustainable Development Goals (SDGs)* bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan, kinerja lingkungan, penghindaran pajak, dan keragaman gender terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa rasio lancar berpengaruh terhadap SDG, arus kas bebas tidak mempengaruhi SDGs, kinerja keuangan berpengaruh terhadap SDGs, kinerja lingkungan menunjukkan pengaruh positif terhadap SDGs, penghindaran pajak berpengaruh terhadap SDGs, dan keragaman gender dewan berpengaruh terhadap SDGs.
12. Penelitian oleh Yuliasih Umi, dan Susetyo Budi (2020) dengan judul *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kinerja Lingkungan terhadap Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030* bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR dan kinerja lingkungan terhadap upaya pencapaian SDGs 2030 di perusahaan pertambangan. Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap upaya pencapaian SDGs 2030, dan pengungkapan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap upaya pencapaian SDGs 2030.
13. Penelitian oleh Farda Agustin Aulia dan Saraswati Erwin (2024) dengan judul *The Influence of CSR Disclosure, Environmental Performance, and Internal Corporate Governance on the Achievement of Sustainable Development Goals* bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan

CSR, kinerja lingkungan dan Tata Kelola Perusahaan Internal terhadap pencapaian SDGs. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengungkapan CSR secara kuantitas dan kualitas memiliki pengaruh positif terhadap pencapaian SDGs, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pencapaian SDGs dan Tata Kelola Perusahaan Internal yang diwakili oleh nondualitas CEO, independensi dewan, dan kehadiran dewan menunjukkan pengaruh yang berbeda terhadap pencapaian SDGs.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tingkat Pengungkapan SDGs

Good Corporate Governance (GCG) berperan penting dalam meningkatkan tingkat pengungkapan *Sustainable Development Goals (SDGs)* melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini mencerminkan upaya perusahaan untuk memperoleh legitimasi sosial dan memenuhi harapan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Implementasi GCG dianggap sebagai kemampuan organisasi yang secara efektif mengelola risiko dan peluang keberlanjutan, sehingga meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan dan pengungkapan SDGs.

Kesimpulannya, GCG menjadi mekanisme strategis yang tidak hanya memperbaiki tata kelola internal, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan informasi keberlanjutan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*). Penelitian oleh Buniamin *et al.* (2022), Pradnyani *et al.* (2024) dan Surifah & Krismiaji (2025) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

2.3.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan SDGs

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, hal ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih lengkap dan transparan secara sukarela. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang lebih memadai, baik dari segi finansial maupun tenaga ahli, yang memungkinkan perusahaan besar untuk menyusun laporan keberlanjutan yang lebih lengkap dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan.

Perusahaan besar juga biasanya berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari regulator, investor, dan masyarakat, sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan tingkat pengungkapan SDGs guna mempertahankan reputasi dan legitimasi sosial. Dengan demikian, ukuran perusahaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi seberapa luas dan detail informasi keberlanjutan yang dipublikasikan, dengan perusahaan yang lebih besar menunjukkan kecenderungan pengungkapan SDGs yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Penelitian oleh Pratama *et al.* (2024) dan Rosati & Faria (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2.3.3. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Tingkat Pengungkapan SDGs

Kinerja lingkungan yang baik memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) perusahaan, dimana perusahaan dengan performa lingkungan yang lebih unggul cenderung lebih terbuka dalam melaporkan aktivitas keberlanjutan mereka. Peningkatan kinerja lingkungan tidak hanya mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik ramah lingkungan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan reputasi perusahaan di mata publik. Sebagai hasilnya, perusahaan terdorong untuk meningkatkan transparansi melalui pengungkapan SDGs yang lebih detail dan akurat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya mempertahankan legitimasi.

Kesimpulannya, kinerja lingkungan yang kuat menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong perusahaan untuk memperluas dan memperdalam pengungkapan informasi terkait tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian oleh Deomega & Sari (2025), Rahmatika *et al.* (2025), Amalikhah & Haryono (2024) dan Farda & Saraswati (2024) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

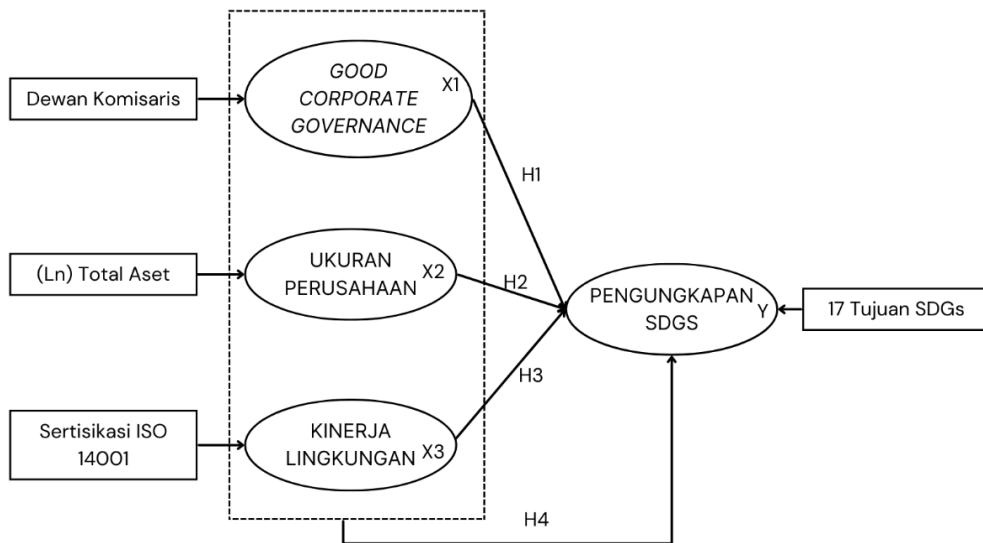
2.3.4. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Lingkungan Secara Simultan Terhadap Tingkat Pengungkapan SDGs

Good Corporate Governance (GCG) memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang mendorong perusahaan untuk secara sukarela mengungkapkan informasi keberlanjutan yang relevan. Selain itu, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan karena perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki sumber daya

yang lebih memadai, termasuk tim khusus dan anggaran untuk pelaporan keberlanjutan, serta berada di bawah tekanan regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan yang lebih tinggi, sehingga mereka cenderung memberikan pengungkapan yang lebih lengkap dan terperinci. Sementara itu, kinerja lingkungan yang baik menunjukkan komitmen nyata perusahaan dalam menerapkan praktik ramah lingkungan, yang tidak hanya meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan, tetapi juga mendorong perusahaan untuk mengkomunikasikan capaian keberlanjutan tersebut secara terbuka melalui pengungkapan SDGs.

Ketiga variabel ini saling berkaitan, di mana tata kelola yang kuat memastikan pengelolaan risiko dan peluang keberlanjutan yang efektif, ukuran perusahaan menyediakan kapasitas dan tekanan eksternal untuk pengungkapan yang lebih luas, serta kinerja lingkungan memberikan informasi yang relevan yang meningkatkan nilai dan kualitas laporan keberlanjutan, sehingga secara bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan SDGs yang dilakukan oleh perusahaan.

2.4. Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah oleh penulis

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.5. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas antara variabel dengan kerangka konseptual diatas, maka penulis menemukan ada beberapa hipotesis yaitu sebagai berikut:

- H1: *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan SDGs
- H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan SDGs
- H3: Kinerja Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan SDGs
- H4: *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan SDGs

(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)